

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah politik termasuk salah satu bidang studi yang menarik perhatian masyarakat pada umumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena masalah politik yang selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tertib, aman, damai, sejahtera, lahir dan batin, yang tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang sudah diterapkan. Karena demikian pentingnya masalah politik ini, telah banyak studi dan kajian yang dilakukan oleh para ahli terhadapnya.¹ Oleh karena itu masalah politik tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan kita sehari-hari, hal ini bisa dilihat dari kaum hawa (perempuan) yang masuk kedalam dunia perpolitikan.

Pada tahun 1930 an merupakan tonggak penting bagi perempuan Indonesia dan bisa dibilang kebangkitan perempuan dalam menyuarakan hak-haknya yaitu dengan digelarnya Konggres Perempuan Indonesia yang dihadiri kurang lebih oleh 30 Organisasi Kaum Hawa (perempuan) di Pendopo Joyodipuro Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928 dan hasil yang diperoleh dari konggres perempuan tersebut berisikan tentang gerakan perempuan Indonesia masa itu tidak hanya menghubungkan hak perempuan dengan nasionalismenya,

¹ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. , *Metodologi Studi Islam* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-17, 2010), h.315.

akan tetapi juga menggunakan argumen nasionalisme untuk menuntut hak perempuan dan kesetaraan.²

Pada era reformasi saat ini pemerintah telah berupaya dalam memberdayakan perempuan demi keadilan itu sendiri, dengan menyusun Program Pembangunan Nasional (Propenas) pada tahun 2000-2004 dan hasil yang diperoleh dari program tersebut yaitu membahas tentang kedudukan dan peranan perempuan dalam 2 (dua) langkah, yaitu : *pertama* ; Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender*. *Kedua* ; Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi-organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka usaha pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.³

Hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945), yaitu terutama Pasal 27 UUD 1945 mengenai persamaan setiap warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa melihat suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hal ini berarti setiap warga negara memiliki kesamaan, baik hak maupun kewajiban dibidang hukum dan

² <http://indonesia-blogger.com/post/201105100914/proposal-penelitian-tesis.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2012 pada pukul 10.15 WIB.

³ <http://indonesia-blogger.com/post/201105100914/proposal-penelitian-tesis.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2012 pada pukul 10.15 WIB.

pemerintahan tanpa terkecuali, dengan kata lain tanpa melihat pula apakah warga negara tersebut berasal dari kaum laki-laki atau perempuan.⁴

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (*International Covenant on the Elimination of Diskrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*International Covenant on the Political Rights of Women*) melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Didalam Pasal 7 Konvensi perempuan mengatur ketentuan mengenai politik bagi kaum perempuan yang antara lain memuat : a) Jaminan persamaan hak memilih dan dipilih; b) Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya ; c) Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; d) Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan; dan e) Berpartisipasi dalam perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.⁵

Pada kenyataannya, perempuan Indonesia seringkali hanya dijadikan objek dari sistem politik untuk mendapatkan posisi politik pihak tertentu. Semasa Orde Baru misalnya, ideologi yang dikembangkan adalah perempuan sebagai kelompok sosial yang fungsinya lebih diutamakan untuk kepentingan domestik saja.

⁴ UUD '45 “ UUD RI 1945 dengan Penjelasan Lengkap beserta Bagian-bagian yang diamandemen serta proses dan perubahannya beserta susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Periode 2009-2014, (Pustaka Agung Harapan : Surabaya), hal 103.

⁵ <http://indonesia-blogger.com/post/201105100914/proposal-penelitian-tesis.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2012 pada pukul 10.15 WIB.

Ideologi negara memprioritaskan perempuan terbatas sebagai pendamping suami dan pendidik anak sehingga potensi perempuan tidak dapat dikembangkan dalam aspek lain. Struktur politik pada masa Orde Baru juga tidak mendorong perempuan untuk memasukinya karena dominasi pria yang sulit untuk ditembus. Peningkatan partisipasi perempuan tidak pernah menjadi agenda partai-partai politik pada zaman itu, walaupun ada perempuan yang menduduki jabatan dalam partai politik, posisi yang diberikan hanyalah yang sekunder dan tidak strategis.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa dunia politik adalah hanya dunia laki-laki saja. Kesan ini muncul akibat adanya *image* yang mungkin tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya. Akibatnya, dibelahan dunia mana pun jumlah perempuan yang terjun di dunia politik relatif kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasi dan persamaan hak dasarnya cukup tinggi.⁶

Di bidang politik, peran perempuan dalam berpolitik juga menunjukkan fenomena yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian. Perempuan tidak hanya memerankan politik secara tradisional (domestik) sebagaimana pernah ditulis oleh Almond dan Verba sebagai agen sosialisasi politik bagi anak-anaknya,⁷ tetapi mulai aktif memperjuangkan kepentingan umum atau kepentingan kelompoknya melalui lembaga sosial atau lembaga politik. Bahkan, tidak jarang mereka menyalurkan kepentingannya melalui saluran nonkonvensional, seperti unjuk rasa dan demonstrasi.

⁶ <http://cloudcullen09.blogspot.com/2009/12/peran-politik-perempuan-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2012 pada pukul 11.15 WIB.

⁷ Lihat Gabriel Almond dan Sidney Verba, “ *The Civic Culture* ”, (Princeton : Princeton University Press, 1963), h.85

Secara kuantitas, dalam satu-dua dekade belakangan ini, jumlah politisi perempuan khususnya di beberapa negara Eropa Barat menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Sehingga, tidak berlebihan jika John Naisbitt dan Patricia Aburdene meramalkan tahun 1990-an merupakan dekade kepemimpinan perempuan.⁸ Menurut hasil KPU (Komisi Pemilihan Umum) di Indonesia sendiri jumlah perempuan yang terjun di dunia politik dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan angka meskipun tidak terlalu besar peningkatannya. Anggota DPR/MPR periode 1987-1992 misalnya, tidak kurang dari 150 anggotanya adalah kaum hawa yaitu perempuan. Itu berarti 15% dari anggota DPR/MPR periode tersebut adalah perempuan. Fenomena semacam ini juga terjadi di lingkungan DPRD tingkat I maupun DPRD tingkat II.⁹ Akan tetapi peneliti berasumsi kalau benar perempuan diberikan kebebasan dalam bidang publik (umum) khususnya dalam bidang politik, mestinya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal berpolitik baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini menimbulkan isu kodrati tentang perempuan yang berkembang dimasyarakat kita semakin menjadi dan semakin sulit untuk dihilangkan.

Menurut peneliti masalah ini tampaknya akan menjadi persoalan yang cukup sulit karena memerlukan penanganan yang cukup serius dalam upaya pencarian solusi bagi keberadaannya. Dalam arti bukan hendak mengubah keberadaan perempuan itu sendiri, melainkan membangun kembali citra perempuan di mata kaum adam (laki-laki), khususnya berkenaan dengan isu kodrati yang melekat pada perempuan sejak lama dan berkembang dimasyarakat

⁸ Lihat John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *Megatrends 2000* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1990), h. 76.

⁹ www.kpu.go.id di akses pada tanggal 20 Juni 2012 pada pukul 23.00 WIB.

yang mengakibatkan perempuan semakin terpuruk pada kondisi yang memprihatinkan.

Tidak mustahil apabila ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa perempuan berpolitik atau keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik tidak mencerminkan sisi perempuan yang ideal dalam Islam. Hal itu karena kuatnya asumsi masyarakat tentang pembagian peran perempuan bekerja di rumah dan laki-laki di luar rumah.

Demikian pula dengan wacana pemimpin perempuan yang telah memancing polemik dan debat antara pihak yang pro maupun yang kontra. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin, meskipun sebagian ada yang membolehkannya, di sisi lain ada kenyataan obyektif adanya sejumlah perempuan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Persepsi Politisi Islam Tentang Perempuan Berpolitik” (Studi Kasus Di DPD PKS Kota Bekasi)**. Menurut peneliti pandangan masyarakat tentang perempuan yang masuk kedalam dunia perpolitikan masih terjadi dua kutub yang berseberangan (baik dari pihak yang pro maupun yang kontra). Di satu sisi pandangan masyarakat menyatakan bahwasannya perempuan harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berpolitik dan disisi lain menyatakan bahwasannya perempuan mempunyai

kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah demikian juga dalam bidang politik. Hal tersebut menurut peneliti terjadi karena belum dipahaminya konsep tentang politik perempuan secara murni, dan juga dalam memahami teks ayat alQur`an yang masih bias/samar-samar.¹⁰

Perbedaan pandangan tersebut menurut peneliti terkait dengan perbedaan dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam terutama ayat al-Qur`an yang berbicara tentang politik. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini peneliti berharap bisa mengungkapkan dan memberi kejelasan kepada masyarakat muslim tentang bagaimana sebenarnya pandangan Islam mengenai perempuan yang berpolitik dan penelitian ini diperkuat dengan persepsi dari politisi-politisi islam khususnya politisi-politisi dari DPD PKS Kota Bekasi tentang permasalahan tersebut agar data-data yang didapatkan semakin kuat dan valid dan diharapkan masyarakat akan memahami dan tidak menganggap tabu terhadap perempuan yang terjun di dunia politik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat identifikasi beberapa masalahnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Konsep perempuan berpolitik yang benar dalam ajaran islam.
- 2) Perempuan berpolitik diartikan dengan salah satu bentuk kesetaraan peran dengan laki-laki.
- 3) Persepsi politisi islam tentang perempuan berpolitik.
- 4) Pandangan hukum islam mengenai perempuan berpolitik.

¹⁰ Nasarudin Umar, argument kesetaraan jendernpersefektif al-qur'an, (Jakarta : Zikrul Hakim,2005),h. 65.

- 5) Peranan/upaya politisi islam dalam meningkatkan dan mendeskripsikan pandangan mereka mengenai perempuan berpolitik kepada masyarakat awam.
- 6) Respon atau tanggapan masyarakat mengenai perempuan berpolitik.

C. Pembatasan Masalah

Melihat identifikasi masalah yang ada cukup banyak dan adanya keterbatasan peneliti. Maka penelitian ini dibatasi atau difokuskan hanya pada Persepsi Politisi Islam Tentang Perempuan Berpolitik (Studi Kasus Di “DPD PKS” Kota Bekasi).

D. Rumusan Masalah

Bertolak dari pembatasan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian: “Bagaimana persepsi politisi islam tentang perempuan berpolitik?”. Pertanyaan penelitian tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan pembantu, diantaranya :

- 1) Apa saja hak politik perempuan menurut pandangan politisi DPD PKS Kota Bekasi?
- 2) Bagaimana pandangan politisi DPD PKS Kota Bekasi dan Al-Qur’an mengenai perempuan berpolitik (kepemimpinan perempuan) ?
- 3) Bagaimana pandangan politisi DPD PKS Kota Bekasi mengenai penyebab munculnya perempuan berpolitik?
- 4) Bagaimana peranan/upaya yang dilakukan oleh politisi DPD PKS Kota Bekasi dalam meningkatkan peran perempuan berpolitik ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang “Persepsi politisi islam tentang perempuan berpolitik” kemudian untuk mengetahui tujuan umum tersebut dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami bentuk hak politik perempuan dalam pandangan politisi DPD PKS Kota Bekasi dan ajaran islam agar nantinya masyarakat tidak tabuh lagi dengan perempuan yang masuk ke dalam dunia politik.
- 2) Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pandangan politisi DPD PKS Kota Bekasi dan Al-Qur’an mengenai perempuan berpolitik terutama dalam hal kepemimpinan perempuan.
- 3) Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pandangan politisi DPD PKS Kota Bekasi mengenai penyebab munculnya perempuan berpolitik.
- 4) Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan/upaya yang dilakukan oleh politisi DPD PKS Kota Bekasi dalam meningkatkan peran perempuan berpolitik.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini akan melengkapi khazanah keilmuan Islam dalam hal membangun kembali citra perempuan di mata kaum adam (laki-laki), khususnya berkenaan dengan isu kodrati yang melekat pada perempuan sejak lama dan berkembang dimasyarakat mengenai perempuan berpolitik menurut ajaran Islam dan diperkuat dengan persepsi Politisi DPD PKS Kota Bekasi

terhadap permasalahan tersebut, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dengannya di masa yang akan datang. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan kepada pihak partai politik agar dapat lebih berperan dalam mengadakan kebijakan-kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan perempuan dan perannya dalam bidang politik.

G. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis karena dilakukan melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam setting keseharian yang alamiah. Realitas merupakan konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas bersifat relatif dimana peneliti berperan sebagai *passionate participant*, fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial.¹¹

Paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini menempatkan posisi penulis/peneliti setara dan sebisa mungkin masuk dengan subjeknya yaitu politisi DPD PKS Kota Bekasi, dan berusaha memahami dan mengkonstruksikan sesuatu yang menjadi pemahaman si subjek yang akan diteliti, karena peneliti sendiri mengadakan secara langsung dan rinci terhadap pelaku sosial yang diteliti.

2. Metode Penelitian dan alasan menggunakan metode tersebut.

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan beberapa pertimbangan ; *Pertama*, dengan pendekatan kualitatif memungkinkan untuk mengetahui bagaimana aplikasi dan persepsi politisi DPD

¹¹ Lumban Gaol, Metodologi Penelitian (Pekerjaan) Sosial, Bahan Kuliah S2 di STISIP Widuri.

PKS Kota Bekasi tentang perempuan berpolitik. *Kedua*, dengan metode kualitatif penelitian dapat dilakukan dalam *natural setting*, dimana politisi DPD PKS Kota Bekasi tersebut tidak bisa dipisahkan dari konteks lingkungannya (dalam hal ini di DPD PKS Kota Bekasi tempat politisi tersebut melakukan kegiatan perpolitikannya, sehingga tidak memungkinkan untuk membatasi atau menentukan variabel-variabel apa yang dapat membentuk persepsi politisi DPD PKS Kota Bekasi tentang perempuan berpolitik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif karena peneliti ingin memberikan gambaran data secara jelas mengenai persepsi politisi DPD PKS Kota Bekasi tentang perempuan berpolitik. Penelitian kualitatif ini berhubungan erat dengan pendekatan yang sifatnya interpretatif dari sudut informan. Untuk mendapatkan data di lapangan peneliti melakukan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi dengan menggunakan teknik purposial sampling (perwakilan) dalam memperoleh data yang diperlukan.

3. Data dan Sumber Data (Sampel dan Populasi)

Penelitian ini dilakukan di DPD PKS Kota Bekasi yang bertempat di wilayah Bekasi Barat. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan DPD PKS Kota Bekasi sebagai objek penelitian dikarenakan untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentang permasalahan yang penulis angkat maka penulis mewawancarai politisi DPD PKS Kota Bekasi yang menurut penulis sangat memahami permasalahan tersebut dan berkompeten dibidangnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data-data informasi yang digunakan oleh penulis diperoleh dengan menggunakan tehnik:

a. Wawancara

Wawancara digunakan dalam rangka studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang diteliti serta ingin mengetahui lebih dalam mengenai politisi DPD PKS Kota Bekasi.¹² Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak struktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.¹³ Wawancara ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai persepsi politisi DPD PKS Kota Bekasi tentang perempuan berpolitik.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung, mengenai persepsi politisi DPD PKS Kota Bekasi tentang perempuan berpolitik.

c. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Jakarta: ALFABETA, 2008) h.194.

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1998), h.227.

persepsi politisi DPD PKS Kota Bekasi tentang perempuan berpolitik. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran umum DPD PKS Kota Bekasi, meliputi: latar belakang historis berdirinya, letak geografis, visi dan misi, tujuan, landasan pemikiran, keanggotaan DPD PKS Kota Bekasi, dan aktivitas yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Bekasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

Dalam analisis data ini teknik pengelolaan data yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara melihat dari data – data primer serta merangkum dan menyeleksi data yang ada yang akan disesuaikan dengan kebutuhan penulis yaitu dengan cara:

a) Reduksi Data

Dalam langkah ini, penulis mengupayakan untuk menghasilkan catatan lapangan yang dicari. Kemudian diidentifikasi dan dicari hal – hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dengan begitu penulis dapat memilah – milah data yang akan digunakan dalam penelitian.

¹⁴ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, Bandung:Alfabeta (IKAPI), 2009,hlm.334.

b) Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, maka akan terlihat data mana saja yang dibutuhkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data yang bertujuan untuk menyusun kategori.

c) Penarikan Kesimpulan

Hal ini dilakukan untuk merumuskan suatu pernyataan yang proposional. Langkah hipotesis ini sudah merupakan teori substantif (yaitu teori berasal dan masih berkaitan dengan data). Adapun hipotesis ini didapati setelah melakukan kedua proses di atas, tentunya menjawab dari setiap pertanyaan penelitian.

6. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di “DPD PKS”(Dewan Pimpinan Daerah PKS) di wilayah Kota Bekasi. Penentuan tempat ini sebagai tempat penelitian didasarkan pada suatu pertimbangan teknis untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, karena peneliti bertempat tinggal di wilayah tersebut. Dan peneliti melakukan penelitian ini antara bulan April sampai Juni 2012 di DPD PKS Kota Bekasi.

H. Pembatasan Istilah

- a. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
- b. Politisi Islam adalah orang yang senantiasa bergerak dengan ide dan pemikiran yang mengusung kepada perbaikan yang nyata baik secara individu, berkelompok maupun berorganisasi sebagai wadah pergerakan

yang mempunyai pedoman (*manhaj*) yang jelas sesuai dengan syariat islam.

- c. Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan urusan yang memikirkan persoalan internal ataupun eksternal dalam memperjuangkan atau mewujudkan tatanan negara yang meliputi diantaranya: memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak lain sehingga akan tercapailah tujuan bersama dan mendatangkan kemaslahatan bagi ummat (rakyatnya).

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan sistematika pembahasan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, pembatasan istilah, sistematika penulisan dan studi kepustakaan.

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL

Dalam bab ini terdapat penjelasan konsep Persepsi dan konsep lainnya yang meliputi ; definisi persepsi, proses terbentuknya persepsi dan sifat persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, definisi politik, sejarah perempuan berpolitik dalam perspektif islam, bentuk hak politik perempuan menurut

ketentuan UUD 1945, dan pandangan atau hukum islam tentang perempuan yang bekerja di bidang politik.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan suatu hasil yang di dapat dari hasil melakukan penelitian atau data – data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis meliputi: konteks penelitian, deskripsi data dan analisis data.

BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran konstruktif yang sekiranya dapat berguna bagi para partai politik, politisi, perempuan, peneliti, penulis, dan mahasiswa yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu tentang perempuan dan politik.